

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum secara komprehensif meletakkan fondasi analisis terhadap pembatalan kebijakan penyesuaian ketentuan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg. Kegagalan kebijakan terjadi dalam waktu singkat bukannya sebuah peristiwa tunggal yang terisolasi. Sebaliknya, ia merupakan titik kulminasi dari konvergensi tiga kekuatan besar: (1) ketergantungan sosio-ekonomi yang mendalam dan telah terstruktur terhadap subsidi energi; (2) kemunculan ruang publik digital baru yang *volatil* dan kuat melalui *Platform X*; serta (3) lanskap politik pasca-pemilu yang kompleks dan diwarnai oleh dinamika elite yang tersembunyi. Dengan membedah ketiga elemen ini, bab ini bertujuan untuk membangun konteks yang kaya dan bernuansa, yang akan menjelaskan mengapa sebuah kebijakan teknokratis dapat runtuh begitu cepat di bawah tekanan mobilisasi digital.

2.1 *Platform X* sebagai Arena Baru Kontestasi Kebijakan Publik

Ekosistem informasi kontemporer Indonesia, media sosial telah berevolusi dari sekadar alat komunikasi menjadi infrastruktur politik yang krusial. Di antara berbagai *platform* yang ada, *platform X* (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) menempati posisi unik sebagai arena utama bagi diskursus kebijakan publik. Bagian ini akan menguraikan transformasi *platform* tersebut di bawah kepemilikan baru dan menganalisis bagaimana karakteristik uniknya, terutama kemampuannya memfasilitasi viralitas, telah menjadikannya kekuatan politik yang mampu membentuk dan bahkan membatalkan agenda kebijakan pemerintah.

2.1.1 Transformasi Twitter menjadi X: Visi "Everything App" dan Implikasinya

Perubahan Twitter menjadi X menandai pergeseran yang jauh lebih mendasar ketimbang sekadar ganti nama atau logo. Transisi ini bermula dari akuisisi jumbo senilai \$44 miliar USD pada Oktober 2022, berlanjut ke tahap *rebranding* resmi di Juli 2023, hingga akhirnya tuntas total saat domain beralih permanen ke X.com pada Mei 2024.

Di bawah kendali Elon Musk, platform ini diarahkan menjadi *everything app* yang berkiblat pada ekosistem *WeChat*. Ambisinya jelas: menyatukan layanan pesan, panggilan video, fitur monetisasi, hingga integrasi kecerdasan buatan Grok dalam satu wadah kebebasan berpendapat (Isaacson, 2023). Visi ini sebenarnya bukan barang baru, melainkan upaya menghidupkan kembali mimpi lama Musk sejak mendirikan X.com pada 1999, cikal bakal PayPal yang revolusioner itu.



Gambar 2. 1 Elon Musk setelah akuisisi Twitter menjadi X
Sumber: X.com

Evolusi X dari sekadar penyebar informasi menjadi ekosistem yang holistik membawa dampak serius bagi diskursus publik di Indonesia. Ambisi komersial

Musk untuk menciptakan "aplikasi super" yang utamanya bertujuan mengikat pengguna agar betah berlama-lama secara tidak langsung justru memperkuat fungsi platform ini sebagai mesin mobilisasi politik (Srnicek, 2017).

Di tengah tingginya adopsi digital masyarakat Indonesia, integrasi berbagai fitur ini ibarat menciptakan lahan subur bagi penyebaran narasi. Pengguna yang awalnya hanya berniat membaca berita atau bertransaksi kini jauh lebih mudah terseret dalam arus isu viral. Keputusan bisnis ini pada akhirnya memangkas hambatan partisipasi dan melipatgandakan kecepatan amarah publik, sebuah fenomena yang terlihat nyata dalam kasus gejolak kebijakan LPG..

2.1.2 Viralitas sebagai Kekuatan Politik: Studi Kasus LPG 3 Kg

Kekuatan politik *Platform X* di Indonesia termanifestasi secara gamblang dalam kasus pembatasan distribusi LPG 3 kg. Isu ini tidak hanya menjadi perbincangan, tetapi meledak menjadi fenomena viral berskala masif. Menurut data dari Drone Emprit, dalam periode singkat antara 29 Januari hingga 4 Februari 2025, isu ini menghasilkan total 10.252.393.396 interaksi di berbagai *platform* media sosial, dengan *Platform X* (Twitter) mendominasi secara absolut dengan menyumbang 99% dari total interaksi tersebut. Angka ini, yang berasal dari total 58.628 *mention*, mengindikasikan jangkauan dan intensitas yang luar biasa.



Gambar 2. 2 Rieke Anggota DPR RI Fraksi PDIP ajak Kawal Lewat Medsos
Sumber: @riekediahp

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka melalui videonya yang berdurasi 50 detik tersebut berhasil ditonton hingga 78 ribu kali oleh netizen, ia mengajak masyarakat Indonesia mengawal kebijakan Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Sub-Penyualur Tinjauan yang ditetapkan pada 1 Februari. Rieke juga turut memberikan opininya terkait segera terbitkan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram. Tujuan dari revisi Perpres adalah menghapuskan gap harga dari agen sampai penyalur dan pengecer. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan harga pasar sehingga subsidi energi benar-benar dinikmati oleh rakyat kecil tanpa terbebani oleh permainan harga yang merugikan.



**Gambar 2. 3 Aksi massa #indonesiagelap turun ke jalan
Sumber: Tempo.co**

Kemunculan tagar viral seperti #IndonesiaGelap dan #PeringatanDarurat secara kilat mengubah keluhan-keluhan yang terpisah menjadi satu narasi kolektif tentang kegagalan negara. Platform ini mampu menyulap antrean lokal menjadi krisis berskala nasional, jauh melampaui kapasitas media konvensional maupun kanal formal. Akselerasi informasi tersebut memaksa pemerintah untuk merespons berdasarkan ritme media sosial yang serba cepat, meninggalkan siklus birokrasi yang lamban. Fenomena kasus LPG ini menjadi bukti empiris bahwa ranah digital kini berfungsi sebagai medan kontestasi wacana yang efektif mendikte perubahan kebijakan, tekanan digital ini bukan sekadar kebisingan maya, melainkan representasi kedaulatan rakyat gaya baru yang menuntut keberpihakan nyata dalam setiap keputusan strategis pemerintah (Lim, 2013).

2.2 Sejarah dan Urgensi Subsidi LPG 3 Kg: Dari Konversi Minyak Tanah hingga Ketergantungan Struktural



Gambar 2. 4 Ilustrasi pembatasan minyak tanah
Sumber: satutulis.com

Dinamika kebijakan subsidi LPG 3 kg tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak historisnya. Apa yang bermula sebagai program ambisius untuk efisiensi fiskal dan transisi energi kini telah bermetamorfosis menjadi jaring pengaman sosial yang vital bagi jutaan rumah tangga. Transformasi fungsi ini pada akhirnya menciptakan ketergantungan struktural yang mendalam, sekaligus menjadikan isu distribusi energi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah komoditas politik yang sangat sensitif (Beaton et al., 2017).

2.2.1 Program Konversi 2007: Urgensi Fiskal dan Lingkungan

Dominasi minyak tanah dalam lanskap energi rumah tangga sebelum 2007 menyisakan persoalan struktural yang pelik bagi Indonesia. Meskipun menjadi tumpuan masyarakat, subsidi besar-besaran terhadap komoditas ini membebani APBN secara tidak wajar, memicu inefisiensi distribusi, serta memperburuk polusi udara. Merespons kondisi kritis tersebut, pemerintah meluncurkan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG pada 2007 sebagai sebuah proyek rekayasa sosial-

ekonomi berskala masif. Langkah strategis ini membawa misi ganda: menyelamatkan kesehatan fiskal negara dari "pendarahan" subsidi, sekaligus mendiversifikasi sumber energi nasional demi mengurangi ketergantungan akut pada minyak bumi.

Berpayung pada landasan hukum seperti Perpres No. 5 Tahun 2006 dan Perpres No. 104 Tahun 2007, inisiatif ini membidik optimalisasi bauran energi tahun 2025 dengan menekan porsi minyak bumi di bawah 20%. Capaian program ini terbilang fenomenal dalam sejarah kebijakan energi publik; dalam kurun waktu sembilan tahun, lebih dari 57 juta paket perdana berhasil didistribusikan ke masyarakat. Kesuksesan implementasi ini diklaim mampu menghemat anggaran subsidi negara hingga mencapai Rp197,05 triliun (Budya & Arofat, 2011).



Gambar 2. 5 SBY Hentikan Produksi Minyak Tanah
Sumber: detik.com

Manifestasi teknis dari arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terwujud melalui penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009. Regulasi ini dirancang sebagai kerangka operasional vital untuk menjamin efektivitas distribusi energi hingga ke level mikro. Secara substansial, aturan ini menegaskan segregasi pasar melalui pemisahan antara 'LPG Umum' (non-subsidi)

dan 'LPG Tertentu' (bersubsidi), di mana kanal distribusi subsidi dikhususkan secara ketat bagi rumah tangga dan usaha mikro. Dengan demikian, regulasi ini berfungsi menerjemahkan mandat Peraturan Presiden menjadi mekanisme teknis yang terukur di lapangan, mencakup penetapan kuota hingga pengawasan rantai pasok (Kementerian ESDM, 2009).

2.2.2 Kebutuhan, Skala, dan Mekanisme Distribusi Subsidi

Desain awal subsidi LPG 3 kg sejatinya difokuskan sebagai bantalan ekonomi bagi rumah tangga miskin dan usaha mikro. Namun, data lapangan menyingkap anomali yang mengkhawatirkan: konsumsi LPG bersubsidi meroket konsisten dari 6,84 juta MT pada 2019 menjadi 7,80 juta MT pada 2022. Ironisnya, lonjakan ini terjadi bersamaan dengan menyusutnya konsumsi LPG non-subsidi, sebuah indikasi kuat adanya migrasi konsumen mampu yang beralih ke barang subsidi. Tren ini memaksa pemerintah memproyeksikan kuota yang kian membengkak hingga 8,17 juta MT pada 2025 (Kementerian ESDM, 2023). Tantangan tata kelola juga terlihat dari sisi validasi penerima. Meski 41,8 juta NIK telah terekam hingga April 2024, angka ini masih terpaut jauh dari basis data P3KE yang mencakup ratusan juta jiwa target sasaran.

Guna menertibkan kebocoran ini, pemerintah memperketat hierarki rantai pasok mulai dari Pertamina, SPPBE, Agen, hingga Pangkalan dengan mewajibkan transaksi berbasis NIK/KTP sejak 1 Januari 2024. Kebijakan ini secara efektif memaksa pengecer informal untuk bertransformasi masuk ke dalam sistem legal jika ingin tetap beroperasi.

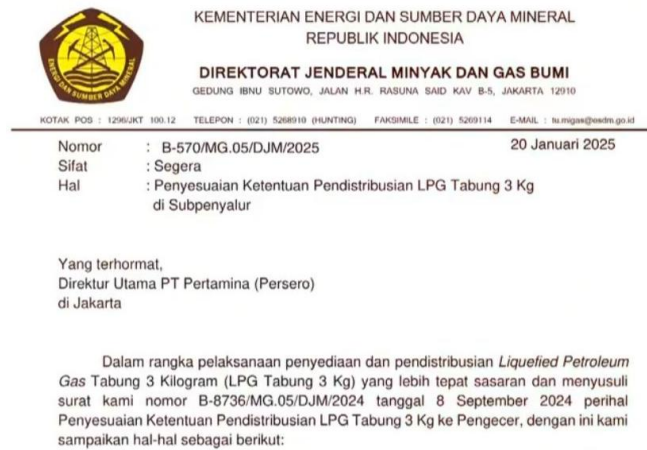
Tabel 2. 1 Kuota dan Realisasi Subsidi LPG

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber oleh Peneliti (2025)

Tahun	Kuota (Juta Metrik Ton)	Realisasi (Juta Metrik Ton)
2019	6.9	6.84
2020	7	7.14
2021	7.5	7.46
2022	8	7.80
2023	+ 8	8.0
2024	8.03	8.2
2025	8.17 (RAPBN)	-

Transformasi kebijakan subsidi LPG 3 kg selama satu setengah dekade terakhir telah mengubah wajahnya secara radikal. Bermula sebagai instrumen teknis transisi energi, skema ini tanpa sadar telah berevolusi menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*) de facto yang tak tergantikan. Ketergantungan ini mengakar begitu dalam pada ekonomi rumah tangga dan usaha mikro, sehingga bagi publik, energi murah adalah hak fundamental, bukan sekadar bantuan negara. Kegagalan kebijakan pada Februari 2025 sejatinya berakar pada ketidakmampuan pemerintah membaca pergeseran makna ini. Ketika regulator bergerak dengan logika "penertiban administrasi" yang kaku, masyarakat merespons dengan amarah defensif karena merasa akses kebutuhan pokoknya terancam. Benturan keras ini menyingkap jurang pemisah yang lebar antara rasionalitas teknokratis negara melawan realitas sosiologis warganya, di mana efisiensi fiskal sering kali tidak sejalan dengan rasa keadilan sosial (Inchauste & Victor, 2017).

2.3 Kronologi Krisis Kebijakan Distribusi LPG Februari 2025



Gambar 2. 1 Surat Edaran (SE) Tentang Pembatasan istribusi Ditingkat sub-Penyialur
Sumber: kementrian ES DM

Empat hari krusial antara 1 hingga 4 Februari 2025 menyajikan studi kasus dramatis tentang bagaimana kebijakan publik dapat memicu turbulensi sosial dalam sekejap mata. Disrupsi ini bermula tepat pada 1 Februari, saat regulator menerbitkan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-570/MG.05/DJM/2025. Regulasi ini secara drastis memutus rantai distribusi tradisional dengan melarang penjualan di tingkat pengecer atau warung, memaksa seluruh transaksi tersentralisasi secara eksklusif di pangkalan resmi. Meski dibalut dengan narasi idealis untuk menertibkan tata niaga dan menjamin ketepatan subsidi, langkah ini justru menjadi pemantik kekacauan karena mengabaikan kesiapan ekosistem di akar rumput (Ditjen Migas, 2025).

Dampak disrupsi terjadi hampir seketika di berbagai titik krusial seperti Semarang, Tangerang, dan Padang. Realitas di lapangan memperlihatkan antrean yang mengular panjang di pangkalan resmi, menandakan ketidaksiapan infrastruktur distribusi baru dalam menampung lonjakan permintaan. Kekacauan ini memukul

telak sektor ekonomi mikro; banyak pelaku usaha kecil seperti pengusaha kuliner rumahan terpaksa menghentikan produksi akibat terputusnya akses energi vital mereka.

Ironisnya, kebijakan yang digadang-gadang untuk menertibkan pasar justru memicu anomali harga yang liar. Di tengah kelangkaan, pasar gelap tumbuh subur dengan lonjakan harga hingga dua kali lipat dari Harga Eceran Tertinggi (HET), semakin menjepit daya beli masyarakat (Tempo, 2025)..



Gambar 2. 6 Bahlil Menteri ESDM

Sumber: Kompas.com

Menteri Bahlil sepatutnya bertanggung jawab atas kebijakannya yang dinilai tidak menyelesaikan masalah publik (Tempo, 2025) Tragedi kemanusiaan di Tangerang Selatan, di mana seorang warga lanjut usia wafat saat mengantre gas, menjadi titik balik yang memilukan dalam krisis ini. Dalam perspektif kebijakan, insiden tersebut berfungsi sebagai *focusing event* sebuah kejadian dramatis yang seketika mengkristalkan amarah publik dan menarik perhatian nasional (Birkland, 1998). Amplifikasi narasi ini bergerak liar di media sosial lewat aktor berpengaruh

seperti @NarasiNewsroom dan @Heraloebss, yang sukses menjadikan tagar #indonesiagelap sebagai simbol perlawanan digital terhadap kegagalan negara.

Tekanan opini yang begitu masif akhirnya meruntuhkan pertahanan pemerintah hanya dalam tempo empat hari. Tepat pada 4 Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi menganulir aturan tersebut, langkah yang turut diperkuat oleh instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total kebijakan yang membebani rakyat. Pembatalan kilat ini menjadi bukti empiris bahwa dalam lanskap politik modern, siklus kebijakan tidak lagi ditentukan semata oleh birokrasi, melainkan sangat rentan terhadap veto sosial dari ruang digital..

2.4 Peta Kekuatan Politik Pasca-Pemilu 2024 dan Dinamika Elite

Krisis kebijakan LPG 3 kg tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan di tengah lanskap politik pasca-Pemilu 2024 yang diwarnai oleh fenomena "kartelisasi partai". Lanskap ini ditandai oleh konsolidasi koalisi pemerintah yang sangat gemuk, sebuah strategi pembagian kekuasaan yang lazim dalam politik Indonesia untuk meredam oposisi (Slater, 2018). Namun, alih-alih solid, struktur raksasa ini justru menyimpan kerentanan berupa friksi kepentingan antar-elite di lingkaran kekuasaan yang berbasis pada perlindungan aset material oligarki (Hadiz & Robison, 2014).

Membedah peta aktor dan relasi kuasa internal menjadi krusial. Kegagalan kebijakan ini tidak bisa dilihat sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan dari gangguan pada mekanisme klientelisme negara, di mana distribusi sumber daya publik (seperti subsidi) kerap menjadi mata uang politik yang transaksional (Aspinall & Berenschot, 2019).

2.4.1 Keseimbangan Kekuatan di Parlemen Periode 2024-2029

Konfigurasi politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) periode 2024-2029, yang menaungi total 580 kursi, mencerminkan hegemoni koalisi pemerintah yang sangat dominan. Blok pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran menguasai mayoritas absolut melalui aliansi strategis antara Partai Golkar (102 kursi), Gerindra (86 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi). Kekuatan ini semakin solid dengan merapatnya PKB yang membawa modal 68 kursi, menciptakan stabilitas politik di atas kertas yang memudahkan eksekusi agenda legislasi pemerintah. Sebaliknya, panggung oposisi atau kekuatan penyeimbang ditempati oleh PDI Perjuangan yang, meskipun berstatus sebagai pemenang pemilu dengan 110 kursi, berada di luar lingkaran eksekutif. Blok penyeimbang ini turut diperkuat oleh Partai NasDem (69 kursi) dan PKS (53 kursi), yang secara kolektif menjalankan fungsi *check and balances* terhadap dominasi koalisi penguasa (KPU RI, 2024).

Tabel 2. 2 Peta Persebaran Partai dalam Legislatif DPR-RI

Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase Kursi (%)	Klasifikasi Koalisi
PDI Perjuangan (PDI-P)	110	18.97	Oposisi/Penyeimbang
Partai Golkar	102	17.59	Pemerintah
Partai Gerindra	86	14.83	Pemerintah
Partai NasDem	69	11.90	Oposisi/Penyeimbang
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	68	11.72	Pemerintah
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	53	9.14	Oposisi/Penyeimbang
Partai Amanat Nasional (PAN)	48	8.28	Pemerintah
Partai Demokrat	44	7.59	Pemerintah
Total Koalisi Pemerintah	348	60.00	-
Total Oposisi/Penyeimbang	232	40.00	-
Total Kursi DPR RI	580	100.00	-

Sumber: Data diolah peneliti (2024)

Dominasi koalisi supermayoritas di parlemen menciptakan sebuah paradoks

kekuasaan yang tajam. Di satu sisi, hegemoni ini memberikan kenyamanan bagi eksekutif karena minimnya hambatan legislatif dari oposisi tradisional seperti PDI-P. Namun, ketiadaan mekanisme *check and balances* yang efektif justru memicu rasa percaya diri berlebih (*political hubris*) yang berisiko menumpulkan ketelitian dalam perumusan kebijakan. Akibatnya, ketika regulasi yang kurang matang seperti pembatasan LPG diluncurkan, fungsi koreksi tidak lagi datang dari Senayan, melainkan meledak dari ruang publik digital.

Situasi ini menempatkan pemerintah dalam posisi yang canggung; mereka sangat tangguh menghadapi lobi politik konvensional, namun gagap merespons kecepatan tekanan viral. Demi menyelamatkan legitimasi dari krisis kepercayaan yang meluas, pemerintah dipaksa membatalkan kebijakan secara reaktif. Fenomena ini menegaskan bahwa matinya oposisi parlemen telah melahirkan bentuk pengawasan baru yang lebih liar dan sulit diprediksi: "oposisi digital" (Castells, 2012; Mietzner, 2021).

2.4.2 Profil Politik Menteri ESDM dan Kedekatan dengan "Geng Solo"

Menteri yang berada di garda depan dan menjadi wajah dari kebijakan yang gagal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Profil politiknya sangat relevan untuk memahami konteks kebijakan ini. Bahlil memiliki rekam jejak yang panjang sebagai seorang pengusaha sukses sebelum terjun ke dunia politik. Puncak kariernya di dunia usaha ditandai dengan jabatannya sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019.



Gambar 2. 7 Jokowi dan Bahli
Sumber: <https://rakyat.news/>

Karier politik Bahlil Lahadalia melesat sangat cepat karena kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo. Mulai dari Kepala BKPM, naik menjadi Menteri Investasi, hingga akhirnya memegang dua jabatan sangat penting sekaligus: Menteri ESDM dan Ketua Umum Partai Golkar pada Agustus 2024. Karena kesetiaannya ini, media sering menyebut Bahlil sebagai bagian dari "Geng Solo", yaitu kelompok orang-orang kepercayaan Presiden.

Latar belakang Bahlil adalah seorang pengusaha. Cara berpikir pengusaha inilah yang terbawa saat membuat kebijakan LPG 3 kg. Dia terlalu fokus pada hitung-hitungan untung-rugi dan kerapian data (supaya hemat anggaran), tapi lupa melihat kondisi nyata di lapangan bahwa rakyat sedang susah. Akibatnya, kebijakan ini gagal total karena tidak peka terhadap penderitaan warga. Kegagalan dari seorang menteri yang dikenal sebagai "anak emas" Presiden ini akhirnya memunculkan dugaan bahwa hubungan antar-pejabat di dalam pemerintahan

sedang tidak baik-baik saja.

2.4.3 Dinamika Prabowo-Gibran-Jokowi: Rencana Suksesi dan Potensi Friksi

Inti masalah politik saat ini ada pada hubungan segitiga antara Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan mantan Presiden Jokowi. Banyak pengamat menilai posisi Gibran adalah strategi "titipan" Jokowi agar pengaruhnya tetap awet, sekaligus persiapan agar Gibran bisa menjadi presiden di masa depan (Kenawas, 2024). Situasi ini menciptakan anggapan adanya "dua matahari" atau dua bos dalam satu pemerintahan: Prabowo sebagai presiden resmi, dan Gibran sebagai wakil kepentingan ayahnya.

Krisis LPG 3 kg kemudian menjadi panggung bagi Prabowo untuk membuktikan siapa bos sebenarnya. Saat Prabowo dengan tegas dan cepat membatalkan kebijakan anak buahnya itu, ia tidak sekadar ingin menolong rakyat. Langkah itu adalah pesan politik yang keras untuk menunjukkan wibawanya. Prabowo ingin menegaskan bahwa dialah pemegang kekuasaan tertinggi saat ini, dan ia berani berbeda sikap dengan orang-orang Jokowi (Gammon, 2024).



Gambar 2. 8 Jokowi dan Prabowo
Sumber: <https://citizen.riau24.com/>

Manuver Prabowo ini juga bisa dibaca sebagai taktik "pagar makan tanaman" untuk mengurangi pengaruh Jokowi di kabinetnya sendiri. Skenarionya cukup cerdas: biarkan menteri andalan Jokowi (Bahlil) membuat kebijakan yang salah fatal, lalu Prabowo tampil bak pahlawan yang membatalkan aturan itu demi rakyat. Dengan begitu, nama Prabowo makin harum, sedangkan reputasi orang-orang Jokowi jadi rusak (Slater, 2018). Di sisi lain, muncul gosip yang lebih ngeri di masyarakat. Ada dugaan bahwa kebijakan-kebijakan aneh ini sengaja dibuat untuk merusak citra Prabowo pelan-pelan. Tujuannya adalah sabotase halus agar posisi Prabowo lemah, sehingga jalan bagi Gibran untuk naik menggantikannya jadi lebih cepat terbuka. Entah benar atau tidak (Aspinall & Mietzner, 2019).